

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan identik dengan negara berkembang. Tingkat kemiskinan negara Indonesia berada pada posisi ke 6 sebagai negara termiskin di Asia Tenggara tahun 2022 (menurut Data Indonesia.com). Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan *Basic needs Approach* untuk memenuhi kebutuhan dasar. Didasarkan pada pendekatan ini, kemiskinan dapat digambarkan sebagai tidak mempunya seseorang dalam memenuhi segala kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan yang diukur dari sisi pengeluarannya.



**Gambar 1. Tren Kemiskinan dalam 5 Tahun Terakhir**

Data BPS menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk meredam angka kemiskinan. Pada September 2019 tercatat sebesar 10,58% (3,68 juta jiwa), kemudian adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka

kemiskinan meningkat di 2020 menjadi 11,25% (4,12 juta jiwa). Pada September 2021 turun menjadi 11,25% (3,93 juta jiwa), kemudian turun kembali di angka 10,93% per Maret 2022. Hal ini dapat memberikan pengertian bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 102,57 ribu jiwa, dengan tingkat kemiskinan 3,93 juta jiwa menurun menjadi 3,83 juta jiwa. (Kuartal I 2022, Jumlah Orang Miskin di Jateng Turun 102,57 Ribu - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ([jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id))).

Pada rilisnya data ini, dipaparkan juga oleh Ir. Adhi Wiriana, M.Si selaku kepala BPS Provinsi Jawa Tengah mengenai kondisi kemiskinan 34 provinsi di Indonesia. Dari data tersebut diperoleh ada 9 provinsi yang masih berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Sedangkan, 25 provinsi lainnya menurun. Provinsi tertinggi yang mengalami penurunan persentasi angka kemiskinan adalah Provinsi Aceh dengan angka 0,89% (43,44 ribu jiwa). Namun secara jumlah, Provinsi Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan total jiwa miskin terbanyak sebesar 102,57 ribu jiwa.

Untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial, pemerintah memberikan dana ke pemerintah daerah, kemudian disalurkan kembali ke pemerintah desa guna membantu masyarakat yang berada di pedesaan. Urusan pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan menjadi kewenangan desa (Prasetyo & Masdjojo, 2015).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mananggulangi masalah kemiskinan seperti adanya program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana

Desa (ADD). Pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan UU No. 6 pada Tahun 2014 tentang Desa. Menurut peraturan tersebut, pada Pasal 72 ayat 1 huruf b, Dana Desa diartikan sebagai dana yang diperoleh dari APBN yang ditujukan bagi desa dan disalurkan melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintahan, proses pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki tujuan khusus yang didasarkan pada UU tersebut adalah peningkatan pelayanan publik, meredam kemiskinan, mengoptimalkan perekonomian daerah, menurunkan tingkat kesenjangan dalam pembangunan antar daerah dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan.

**Tabel 1. Pagu Dana Desa per Kabupaten Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PAGU 2020</b>
1	KAB. SEMARANG	186.914.532.000
2	KAB. KENDAL	251.320.499.000
3	KAB. DEMAK	287.089.488.000
4	KAB. GROBOGAN	304.990.065.000
5	KAB. PEKALONGAN	266.336.610.000
6	KAB. BATANG	195.614.218.000
7	KAB. TEGAL	361.348.720.000
8	KAB. BREBES	495.634.148.000
9	KAB. PATI	430.714.441.000
10	KAB. KUDUS	149.152.722.000
11	KAB. PEMALANG	329.535.761.000
12	KAB. JEPARA	249.106.533.000
13	KAB. REMBANG	263.625.423.000
14	KAB. BLORA	270.000.037.000
15	KAB. BANYUMAS	381.798.090.000
16	KAB. CILACAP	296.800.979.000
17	KAB. PURBALINGGA	248.095.972.000
18	KAB. BANJARNEGARA	268.003.259.000
19	KAB. MAGELANG	395.010.278.000
20	KAB. TEMANGGUNG	250.756.487.000
21	KAB. WONOSOBO	219.777.303.000
22	KAB. PURWOREJO	369.061.708.000

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU 2020
23	KAB. KEBUMEN	409.878.212.000
24	KAB. KLATEN	385.072.138.000
25	KAB. BOYOLALI	219.802.085.000
26	KAB. SRAGEN	173.221.301.000
27	KAB. SUKOHARJO	146.662.487.000
28	KAB. KARANGANYAR	167.891.190.000
29	KAB. WONOGIRI	227.393.914.000

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Desa

Mengacu pada PP No. 72 pada tahun 2005, Alokasi Dana Desa (ADD) diartikan sebagai pendanaan yang diberikan kepada desa oleh pemerintahan kota atau kabupaten, yang berasal dari sebagian pendanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana ini sangat penting bagi desa untuk mendukung program-program desa. Tujuan utama dari ADD adalah sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007).

ADD dibagi ke dalam persentase yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni 30% dari ADD digunakan untuk pembiayaan operasional daerah, sedangkan 70% digunakan untuk Pembangunan daerah dalam bentuk fisik serta peningkatan pemberdayaan Masyarakat. Meskipun ADD telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, namun permasalahan mengenai kemiskinan masih selalu ada di setiap daerah terutama di Provinsi Jawa Tengah (Danadesa.id).

Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yakni dengan memperhatikan nasib mereka seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mudatsir: 38-46: **كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابُ ﴿٣٩﴾** **الْيَمِينِ ﴿٤٠﴾ فِي جَنَّتٍ يَنْسَاءُلُونَ ﴿٤١﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٢﴾ مَا سَأَلَكُمْ فِي سَعَى قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ**

الْمُصَلِّينَ ۖ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۖ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۖ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

yang artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam syurga, mereka tanya menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, ‘Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?’” Mereka menjawab: ‘Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak (pula) memberi orang miskin dan adalah kami membicarakan yang bathil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan.’” (QS. Al-Mudatsir: 38-46).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wijaya, D. N & Arifin, Z (2018), yang meneliti variabel DD, ADD dan DAU terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016. Model data panel yang terpilih yakni *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa terjadi perkembangan kemiskinan di Jawa Timur. Namun, penelitian ini kembali menguji DD dan ADD dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 dengan menggunakan model data panel yang berbeda.

Mengacu pada permasalahan di atas, maka program pemerintah berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan faktor yang akan memberikan pengaruh baik terhadap tingkat kemiskinan apabila dilakukan dan diatur dengan maksimal. Hal ini akan berpengaruh baik dari segi bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, Pembangunan, maupun pemberdayaan di setiap desa. Oleh karena itu, peneliti

ingin mengetahui pengaruh DD, ADD, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan tentang hubungan antara DD, ADD, PDRB dan kemiskinan, sehingga dapat menjadi penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

**2. Manfaat Parktis**

Memberikan masukan bagi pemerintah dan pelaku pembangunan desa di Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan.

**3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti, akademisi dan praktisi yang tertarik melakukan penelitian atau mengembangkan program pengentasan kemiskinan di pedesaan